KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I **BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL** **PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL**	Nomor SOP	PHN-OT.02.02-77
	Tanggal Pembuatan	15 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
		PROF. DR. H. R. BENNY RIYANTO, S.H., M.HUM., C.N. NIP. 19620410 198703 1 003
	Nama SOP	**APLIKASI EVALUASI *DATABASE* HUKUM NASIONAL (EVADATA HUKUM NASIONAL)**

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 2. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135	Nama Kegiatan : PEnggunaan Aplikasi Evaluasi Database Hukum Nasional (E-VADATA) ▪ Aplikasi E-Vadata Hukum Nasional dirancang oleh Pusanev untuk mempermudah para analis hukum dari Kementerian Hukum dan Ham baik Pusat maupun Daerah dalam melaksanakan analisis dan evaluasi hukum khususnya peraturan perundang-undangan. Selain itu kedepannya aplikasi ini juga akan menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi atas seluruh rekomendasi Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional kepada seluruh Kementerian/Lembaga terkait, dan juga sebagai wadah bagi seluruh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. ▪ Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur di dalamnya yaitu “list peraturan perundang-undangan,” “worksheet” dan “database hasil analisis dan evaluasi hukum”. Database analisis dan evaluasi hukum nasional ini dimaksud agar seluruh hasil analisis dan evaluasi yang sudah terbuka untuk umum terkompilasi

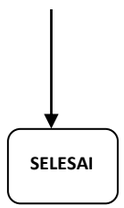
	pada satu fitur yang sama. Pada database analisis dan evaluasi hukum ini merupakan hasil rekomendasi yang sudah disetujui oleh Kepala Pusanev, sehingga seluruh isi dari database analisis dan evaluasi hukum nasional dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam aplikasi E-Vadata Hukum Nasional terdapat sistem bertingkat yang bertujuan untuk memberikan hasil rekomendasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tingkatan Pengguna pada aplikasi E-Vadata Hukum Nasional, sebagai berikut: 1) Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional; 2) Kepala Bidang pada Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional; 3) Ketua Pokja pada Tahun Anggaran berjalan; 4) Sekretaris Pokja pada Tahun Anggaran berjalan; 5) Anggota Pokja pada Tahun Anggaran berjalan Sistem bertingkat ini dimaksudkan agar hasil analisis dan evaluasi pada setiap tingkatannya terdapat supervisi sehingga hasil rekomendasinya dapat lebih baik dan dipertanggungjawabkan. Admin sistem merupakan salah satu jenjang pengguna yang bersifat administratif. Pada admin sistem memiliki fungsi sebagai pembuat akun-akun para pengguna pada tahun anggaran berjalan. Pada setiap awal tahun anggaran berjalan, admin sistem akan membuatkan akun para pengguna yang terdiri dari Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) dan anggota Pokja untuk masing-masing Pokja yang sudah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Selain memiliki fungsi sebagai pembuat akun-akun sekretaris dan anggota pokja, admin sistem juga dapat memperbaiki beberapa fitur yang dirasa perlu adanya penyesuaian. Pembuatan Aplikasi E-vadata bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keterkaitan :	**Peralatan / perlengkapan :**
1. SOP Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional 2. SOP Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	**Referensi:** 1. Buku 2. Peraturan Perundang-undangan 3. Jurnal 4. Majalah 5. Makalah Seminar 6. Internet 7. Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Evaluasi Database Hukum Nasional (E-vadata) 8. Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 tahun 2019 **Alat:** 1. Ruangan Kerja 2. Perangkat Komputer dan *Printer* 3. Laptop 4. USB 5. ATK
Peringatan :	**Pencatatan dan pendataan:**
	1. Dicatat dan didata di Subbag Tata Usaha Pimpinan Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional; 2. Dicatat dan didata di Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Sekretariat BPHN; 3. Dicatat dan didata di Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional.

No.	AKTIFITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA.BPHN	KAPUS ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL	KABID	KETUA POKJA	SEKRETARIS POKJA	ANGGOTA POKJA	ADMIN SISTEM	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pembuatan Menu Pokja dan Pembuatan akun ketua pokja, Sekretaris Pokja, dan anggota Pokja Oleh admin sistem							MULAI	• Surat Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Kerja • Aplikasi E-vadata	B01	• Menu Pokja • Akun ketua pokja, Sekretaris Pokja, dan anggota Pokja	
2.	Menginput PUU yang dievaluasi oleh Pokja Oleh Sekretaris Pokja								• Pemberitahuan dari admin bahwa menu pokja, akun ketua pokja, Sekretaris Pokja, dan anggota Pokja • Data inventarisasi PUU yang dievaluasi oleh Pokja • Aplikasi E-vadata	B01	Menu PUU yang dievaluasi oleh Pokja	

No.	AKTIFITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA.BPHN	KAPUS ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL	KABID	KETUA POKJA	SEKRETARIS POKJA	ANGGOTA POKJA	ADMIN SISTEM	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
3.	Melakukan Analisis PUU oleh Anggota Pokja								• Informasi cara Penggunaan Aplikasi Evadata • Aplikasi E-vadata	B03	Evaluasi dari ketua, sekretaris dan anggota Pokja	
4.	Pemeriksaan atas Analisis PUU Anggota Pokja oleh Sekretaris								• Evaluasi Hukum dari masing-masing anggota Pokja • Aplikasi E-vadata	B06	Evaluasi PUU	
5.	Mengolah dan menghubungkan atas hasil evaluasi sekretaris dan seluruh anggota pokja oleh Ketua Pokja								• Penyampaian kepada Ketua Pokja • Aplikasi E-vadata	B06	Evaluasi PUU	

No.	AKTIFITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA.BPHN	KAPUS ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL	KABID	KETUA POKJA	SEKRETARIS POKJA	ANGGOTA POKJA	ADMIN SISTEM	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
6.	Mengolah dan menghubungkan atas hasil evaluasi oleh Kepala Bidang								• Hasil evaluasi yang telah direviu Ketua Pokja • Aplikasi E-vadata	B09	Evaluasi PUU	
7.	Memeriksa dan menyetujui hasil evaluasi peraturan perundang-undangan yang telah di hasilkan oleh Pokja, dan diketahui pula oleh Kepala BPHN.								• Penyampaian hasil evaluasi kepada Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional • Aplikasi E-vadata	B09	Hasil Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum masing-masing Pokja.	

No.	AKTIFITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA.BPHN	KAPUS ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL	KABID	KETUA POKJA	SEKRETARIS POKJA	ANGGOTA POKJA	ADMIN SISTEM	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
8.	Hasil Analisis dan Evaluasi masuk kedalam Database Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional								• Hasil Akhir • Publikasi • Aplikasi E-vadata	B09	Hasil Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum masing-masing Pokja.	